GUNTINGAN BERITA

Surat Kabar : **Suara pembaruan**
Subyek : **Lumpur Lapindo**
Tanggal : **12 mei 2007**
Hari : **Sabtu**
Halaman : **13**

Dampak Lumpur Lapindo
Lahan Ambles Meluas hingga 3 Km

[SURABAYA] Lahan tanah yang akan mengalami ambles di sekitar pusat semburan lumpur yang terjadi di dekat sumur Banjar Panji 1 milik PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Sidoarjo, diperkirakan meluas mencapai areal sampai radius tiga kilometer (km). Fakta ini terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) optimalisasi pembangunan dan pengamanan infrastruktur di Surabaya, Jumat (11/5).

Dalam paparan, lahan ambles diprediksi mencapai tiga km ke arah utara dan selatan. Sedangkan untuk arah barat timur seluas 2,5 hingga 3 km Luas ini dua kali lipat dari sebelumnya yang hanya 1,5 km dari pusat semburan. Tetapi laju penurunan subsidence mengalami perlambatan dibandingkan dengan laju Mei-November 2006 dan laju November-Mei 2007, yaitu rata-rata subsidence 7 cm per bulan.

"Memang ada perkiraan luas subsidence bertambah, tapi kita masih mencari informasi soal itu," kata Wakil Ketua Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Hardy Prasetyo.

Rakor ini dalam rangka mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk menyusun skenario alternatif penanganan lumpur. Sementara itu, target relokasi akan dilakukan tahun ini, yang paling dekat adalah merelokasi pipa gas Pertamina.

Mengenai meluapnya lumpur kembali masuk ke Jalan Raya Porong, Hardy mengatakan, itu merupakan kesalahan warga Siring karena melarang BPLS melakukan penanggulan. Untuk wilayah Ketapang dan Perumahan Tanggulangi Anggun Sejahtera, warga sekitar memperbolehkan BPLS membangun tanggul.

Sementara itu, puluhan korban lumpur warga Desa Renokenongo yang ada di pengungsian Pasar Baru Porong melakukan aksi mogok makan Jumat pagi, karena beberapa kali jatah makan sudah basi. Mereka menuntut jatah makan itu diberikan dalam bentuk uang. Tuntutan tidak ditanggapi Dinas Sosial Sidoarjo. "Ini puncak kekesalan kami karena permintaan jatah makan diganti uang tunai tidak digubris," kata Sunarto, warga Desa Renokenongo.

Warga minta jatah makan dalam bentuk uang agar warga bisa mengelola sendiri kebutuhan makan sesuai selera. Selama ini warga mendapat jatah makan tiga kali sehari senilai Rp 5.000 per satu kali makan

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Wakil Ketua Paguyuban Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak, Pitanto mengatakan, aksi warga dilakukan untuk mendesak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan jatah makan dalam bentuk uang.

Ganti Rugi

Sepakat Vice Manager PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabusalla mengatakan, delapan dari 23 pengusaha korban lumpur Sidoarjo sepakat menerima jual beli ganti rugi dari PT Minarak Lapindo Jaya, perusahaan yang ditunjuk Lapindo membayar ganti rugi, dengan total Rp 42,7 miliar. Pembayaran uang muka tahap pertama 20 persen dilakukan awal Juni mendatang.

Untuk pembayaran tahap kedua, tambahnya, khusus dibayarkan kepada perusahaan yang masih mempunyai utang di luar sehingga bukan pengusaha yang menerima, tetapi pihak pengutangnya yang menerima. Sedangkan pembayaran tahap ketiga sebesar 70 persen, akan dibayarkan antara Mei sampai Desember 2008.

Tidak disebutkan berapa jumlah masing-masing pengusaha akan menerima ganti rugi, karena pengusaha tidak mengizinkan Lapindo memublikasikan untuk umum.

Namun, kedelapan perusahaan tersebut Melina Dewi, Andrian Zulkarnain, CV Karya Kasih Karunia, PT Supra Surya Indo, PT Srikaya Putra Mas, PT Yamaindo Perkasa, PT Victory Rotanindo, dan CV Airlangga Mebelindo Desain.

Konsep jual-beli ganti rugi, berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan Lapindo.

Sebelumnya pengusaha mengajukan ganti rugi secara terperinci untuk tanah, bangunan, peralatan, maupun buruh yang terendam lumpur. Lapindo menghitung sendiri nilai jual beli ganti rugi tersebut.

Dua konsep berbeda itu kemudian dimusyawarahkan. Apabila dalam konsep yang diajukan pengusaha 100 persen atau misalnya senilai Rp 8 miliar, maka yang disepakati totalnya antara 70 sampai 80 persen. Jika pengusaha tidak bersedia dengan konsep tersebut, Lapindo belum memenuhi permintaan pengusaha.

Sementara itu, sebagian besar pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Korban Luapan Lumpur (GPKLL) masih menunggu kabar dari Lapindo untuk menggelar pertemuan lagi. Ketua GPKLL Ritonga mengatakan, pihaknya akan terus memantau tindak lanjut dari pertemuan yang sebelumnya berlangsung dengan mediasi DPRD Jatim. Pertemuan selanjutnya akan ditangani BPPLS. [029/080]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup